

2024



Kecamatan Pakal

SURABAYA

PERUBAHAN RENJA 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Maksud dan Tujuan	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Sistimatika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN .	5
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	7
BAB IV PENUTUP	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pakal Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Pakal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pakal Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pakal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Pakal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pakal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Pakal dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakal dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Surabaya.
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Pakal tahun 2024.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Kecamatan Pakal Tahun 2024.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pakal Tahun 2024.

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakal Tahun 2024 dilakukan dengan mengacupada peraturan perundang- undangan, sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286).
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438)
- 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700).
- 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578).
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
- 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815).
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 21 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025
- 22 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya

- 23 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021
- 24 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- 25 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024

I.3 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Pakal Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Maksud dan Tujuan Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan Renja Tahun 2024 Kecamatan Pakal.
1.2	Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Kewenangan Kecamatan Pakal, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Pakal.
1.3	Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan RENJA Kecamatan Pakal serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKAL
BAB IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakal Tahun 2024 dilaksanakan dalam 5 (lima) program yang meliputi; 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Program – program tersebut diwujudkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Pakal bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan Pakal dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi renja Kecamatan Pakal Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dijabarkan secara lengkap pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Pakal sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							K
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10	11	12=8+9+10+11				13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%
					pelanggaran Perda di Kecamatan																			
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		120,295				289,465		31,414		23,823	-	-		55,237		55,237		45.92%		
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi		17 Lokasi		15 Lokasi		15 Lokasi		-	-		15 Lokasi		32 Lokasi		213.33 %			
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		157,159				289.465		31.414		23.823	-	-		55.237		55.237		35,15%		
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan	-	-		6 Laporan		6 Laporan		N/A		
7.01.05				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		20,098		16,134		15,843		2,862		2,862	-	-		2,862		18,996		94,51%		
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %	-	-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		20,098				15,843		2,862		0	-	-		2,862		2,862		14.24%		
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus		25 Kasus		12 Kasus		4 Kasus		10 Kasus	-	-		10 Kasus		35 Kasus		291.67 %		
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		2 Topik		2 Topik		0 Topik		2 Topik	-	-		2 Topik		4 Topik		200.00 %		
7.01.05.2.01.02				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		22,510				6.900		0		0	-	-		0		0		0,00%		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		N/A		166 Orang		0 Orang		50 Orang	-	-		50 Orang		50 Orang		N/A		
7.01.05.2.01.05				Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan		10,049				8.943		2.862		0	-	-		2.862		2.862		28,48%		
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan	-	-		6 Laporan		6 Laporan		N/A		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dasar penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pakal Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Walikota Surabaya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Pakal Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pakal Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakal Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Pakal Tahun 2024 dirumuskan dalam 5(lima) program terdiri dari :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
- 4) Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan
- 5) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Pakal Kota Surabaya menyusun Program dan kegiatan untuk Tahun 2025 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA

- | | |
|--------------|--|
| Kegiatan | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| Penjabaran | : Kegiatan ini mencakup pengelolaan dan pemenuhan hak-hak keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di perangkat daerah. Prosesnya meliputi perencanaan, penghitungan, dan pencairan gaji serta tunjangan lain yang menjadi hak ASN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna memastikan kesejahteraan dan keberlangsungan kinerja ASN. |
| Kegiatan | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan | : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| Penjabaran | : Kegiatan ini meliputi penyediaan dan pemeliharaan sarana kerja yang menunjang kinerja operasional perangkat daerah. Peralatan dan perlengkapan yang disediakan mencakup kebutuhan perkantoran, seperti alat tulis kantor, peralatan elektronik, dan perabot kantor yang mendukung aktivitas administrasi, guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif |

dan efisien.

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini bertujuan untuk menjaga dan memperpanjang masa pakai fasilitas gedung kantor serta bangunan milik pemerintah lainnya. Aktivitasnya meliputi perbaikan, perawatan, dan rehabilitasi fasilitas, termasuk perbaikan struktural dan penataan ulang sarana pendukung. Dengan demikian, bangunan tetap berfungsi optimal, aman, dan nyaman untuk seluruh pegawai serta masyarakat yang memanfaatkannya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Penjabaran : Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan keharmonisan dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Melalui koordinasi antara perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, kegiatan ini mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan agar selaras dengan kebijakan dan program yang ada di tingkat kabupaten/kota maupun pusat.
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini berfokus pada upaya peningkatan kualitas dan efektivitas layanan publik di kecamatan, khususnya bagi urusan yang belum terwadahi oleh perangkat daerah tertentu. Melalui penguatan prosedur pelayanan dan pelatihan petugas, kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan memadai.
- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini melibatkan pelaksanaan tugas pemerintahan di luar perizinan, seperti administrasi kependudukan, surat keterangan, atau dokumen nonperizinan lainnya. Dengan

- pelimpahan wewenang ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efisien dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di kecamatan
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini melibatkan pelaksanaan tugas pemerintahan di luar perizinan, seperti administrasi kependudukan, surat keterangan, atau dokumen nonperizinan lainnya. Dengan pelimpahan wewenang ini, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin efisien dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di kecamatan.
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Penjabaran : Kegiatan ini mencakup pelaksanaan urusan yang merupakan bagian dari kewenangan tambahan yang diberikan kepada camat. Hal ini meliputi berbagai layanan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan daerah, bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan di tingkat kecamatan dan mendekatkan akses pelayanan bagi masyarakat setempat.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam ForumMusyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Melalui forum musyawarah, masyarakat didorong untuk memberikan masukan, berpartisipasi aktif dalam perencanaan, dan ikut menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. Hal ini dilakukan agar pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Penjabaran : Kegiatan ini meliputi pembangunan atau perbaikan infrastruktur fisik di kelurahan, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, ruang publik, dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan aksesibilitas fasilitas di kelurahan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan

kemandirian masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan akses informasi. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan di kelurahan dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.

- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan oleh lembaga kemasyarakatan di tingkat desa atau kelurahan, seperti balai warga, ruang pertemuan, perlengkapan kegiatan, dan peralatan lain yang mendukung. Penyediaan sarana dan prasarana ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas kegiatan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan program-programnya, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung kegiatan sosial, ekonomi, serta budaya yang bermanfaat bagi komunitas setempat.
- Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini berfokus pada penyediaan dukungan bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha ekonomi lokal. Kegiatan ini meliputi pelatihan kewirausahaan, akses terhadap modal usaha, bantuan peralatan, serta pendampingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas masyarakat dalam berwirausaha. Dengan fasilitasi ini, diharapkan tercipta peluang ekonomi baru, peningkatan pendapatan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Penjabaran : Sub-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah kecamatan dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta instansi vertikal lainnya yang berada di wilayah kecamatan. Melalui sinergi ini, diharapkan terjalin kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, penanggulangan bencana, kegiatan sosial, serta mendukung program-program pemerintah yang memerlukan keterlibatan lintas lembaga. Kegiatan ini juga mencakup pertemuan berkala, penyusunan rencana bersama, dan evaluasi kegiatan untuk mencapai efektivitas dalam

pelayanan kepada masyarakat.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai PenugasanKepala Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Penjabaran	: Sub-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan konsultasi. Kegiatan ini melibatkan fasilitasi dan koordinasi antarinstansi terkait, bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan kepedulian terhadap persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan ketahanan nasional di tingkat lokal. Dengan pembinaan yang dilakukan secara rutin, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan dan mampu berkontribusi dalam menjaga ketahanan nasional.
Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai PenugasanKepala Daerah
Sub Kegiatan	: Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
Penjabaran	: Sub-kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi konflik sosial di masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemantauan situasi sosial, deteksi dini terhadap gejala konflik, mediasi antar-pihak yang berselisih, serta pelaksanaan tindakan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Penanganan dilakukan melalui kerja sama dengan pihak terkait, seperti aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pakal pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output namun ada rasionalisasi anggaran. Perubahan Renja Kecamatan Pakal Tahun 2024 melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Kec. Pakal Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40 %	20,190,401,439	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,40 %	21,181,471,123	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,002,477,440	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	16,499,041,339	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	16,002,477,440	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	16,499,041,339	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,042,697,305	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	4,532,124,884	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,042,697,305	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Pakal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	501 Paket	4,532,124,884	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	145,226,694	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	150,304,900	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	145,226,694	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	150,304,900	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	75,855,992	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	72,173,192	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %		
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,700,000	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	2,700,000	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	2,700,000	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	12,366,000	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	229 Lembaga	8,683,200	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12,366,000	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8,683,200	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	60,789,992	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	60,789,992	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1,680,540	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Pakal	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 Dokumen	1,680,540	
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	51,352,868	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	51,352,868	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,756,584	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	7,756,584	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	14,932,096,363	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5 %	14,932,096,363	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,781,871,243	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	14,781,871,243	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Pakal	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	6,000,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2,687,510,609	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	33 Unit	2,790,971,312	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3,012,403,238	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 Unit	3,012,403,238	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,646,400,655	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	3,675,971,055	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,408,151,796	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 Unit	2,624,547,638	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,342,773,203	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Babat Jerawat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	1,239,312,500	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	424,625,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pakal	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	424,625,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	557,382,900	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sumberejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	527,812,500	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	696,623,842	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Benowo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	480,228,000	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	150,225,120	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	34 Lembaga	150,225,120	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	129,070,800	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pakal	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	34 Unit	129,070,800	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	21,154,320	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	21,154,320	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	111,625,152	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	122,596,353	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	111,625,152	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	122,596,353	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	111,625,152	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	122,596,353	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,515,600	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	16,515,600	
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	16,515,600	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	12 Kasus	16,515,600	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	166 Orang	6,900,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	Kec. Pakal	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,	166 Orang	6,900,000	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9,615,600	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Pakal	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	9,615,600	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakal Tahun 2024 merupakan acuan bagi Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Pakal dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Surabaya 2005-2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pakal Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ini diharapkan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Kecamatan Pakal dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, 06 Agustus 2024



DEDDY SJAHRIAL KUSUMA, SH
Pembina Tingkat I
NIP.197101311998031007